

NEWSLETTER

APBNKITA

KINERJA DAN FAKTA | FEBRUARI | 2026

**KINERJA FISKAL KUAT
DAN BERDAMPAK NYATA,
APBN 2026 Adaptif Menjaga Stabilitas
dan Mendorong Pertumbuhan**

Foto: Pexels - Pamanjoe

#KATAMENTERIKITA

“

APBN tetap solid, sehat, dan adaptif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. APBN akan terus menjalankan perannya menjaga stabilitas ekonomi, mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan, serta melindungi daya beli masyarakat. Program-program prioritas pemerintah berjalan efektif dan terukur, dengan tetap menjaga ruang fiskal agar tetap aman.



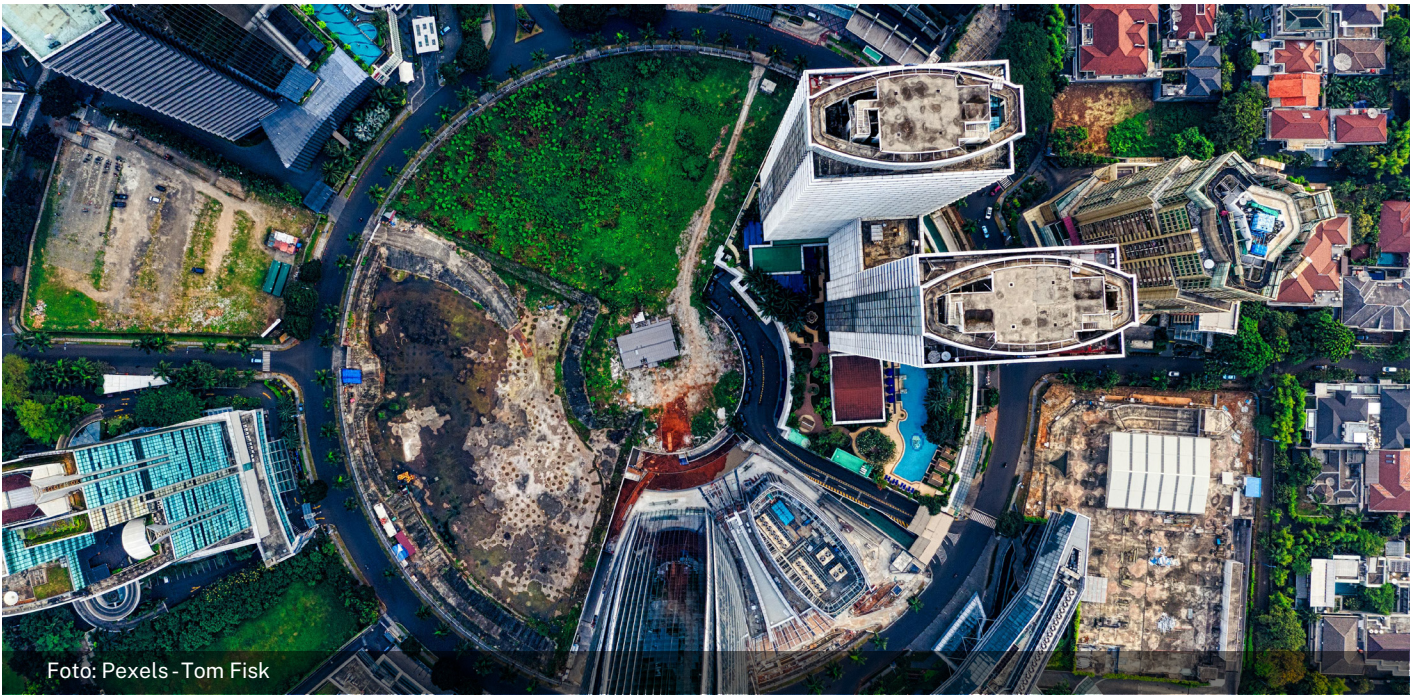


Foto: Pexels - Tom Fisk

Ekonomi Indonesia Resilien di Tengah Gejolak Global

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2025 Melampaui Ekspektasi, Ditopang Penguatan Domestik

Tahun 2026 dibuka dengan kabar baik. Pada awal Februari, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan IV 2025 sebesar 5,39% (yoy), tertinggi sejak Triwulan IV 2022. Tak hanya melampaui ekspektasi, namun capaian ini juga menegaskan bahwa aktivitas ekonomi di penghujung 2025 benar-benar membaik dan menunjukkan titik balik yang semakin jelas.

Berbeda dengan lonjakan pada tahun 2022 yang dipengaruhi efek pemulihan pascapandemi, akselerasi pertumbuhan di akhir 2025 menandakan fundamental domestik yang lebih solid. Konsumsi tetap bergerak, investasi terus mengalir, dan aktivitas usaha kembali ekspansif. Momentum ini terbentuk justru ketika perekonomian global masih menghadapi tekanan.

Sepanjang 2025, pertumbuhan bergerak semakin stabil. Diawali dengan 4,87% (yoy) pada Triwulan I, lalu menguat hingga mencapai 5,39% (yoy) pada Triwulan IV, sehingga secara keseluruhan tumbuh 5,11% sepanjang tahun. Capaian ini bahkan melampaui proyeksi sejumlah lembaga internasional yang sebelumnya

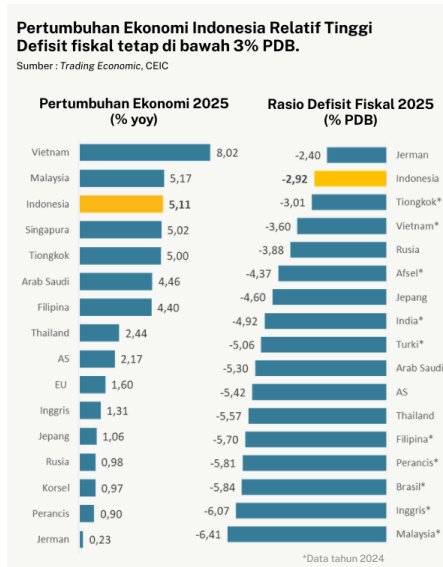
memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah 5%.

Dalam perspektif global, Indonesia menempatkan diri sebagai salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tinggi sekaligus defisit yang relatif rendah pada 2025, disertai dengan rasio utang yang terkendali pada level aman. Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan dan kehati-hatian fiskal bukanlah dua hal yang saling meniadakan, melainkan dapat dikelola secara simultan melalui stimulus yang terukur tanpa meninggalkan disiplin fiskal.

Permintaan Domestik Menguat, Investasi Ekspansif, Belanja Negara Terarah

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga kembali menjadi motor utama pertumbuhan, tumbuh 4,98% (yoy) sepanjang 2025. Penguatan ini sejalan dengan meningkatnya mobilitas dan aktivitas ekonomi, tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) yang tumbuh serta Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang membaik sejak Oktober hingga Desember 2025.

Pertumbuhan konsumsi terutama terlihat pada subkomponen Transportasi dan Komunikasi, Makan dan Minum, serta Restoran dan Hotel. Momentum Natal dan Tahun Baru mendorong peningkatan perjalanan wisatawan nusantara dan jumlah penumpang di berbagai moda, khususnya angkutan rel. Penguatan tersebut tidak lepas dari dukungan kebijakan insentif dan stimulus Pemerintah. Berbagai program seperti bantuan sosial, BLTS, magang, serta diskon tarif transportasi secara efektif menjaga daya beli dan mendorong aktivitas ekonomi.

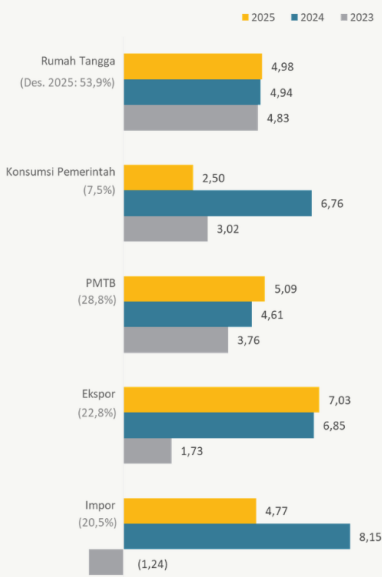


Ekonomi Indonesia Tahun 2025 Tumbuh Tinggi

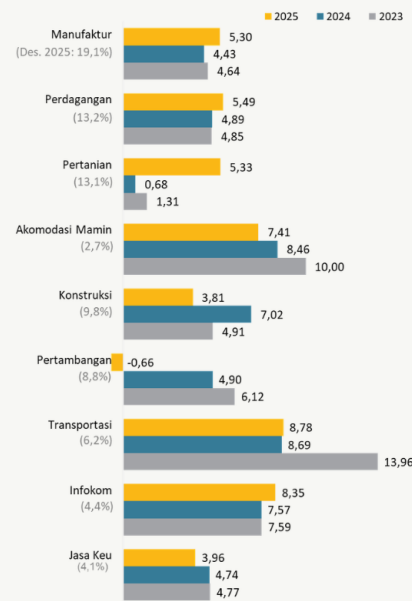
Ditopang Permintaan yang Kuat dan Produksi Bernilai Tambah

Sumber: BPS

Pertumbuhan Menurut Komponen Pengeluaran (% yoy)



Pertumbuhan Menurut Komponen Produksi (% yoy)



Peran konsumsi Pemerintah semakin menguat pada paruh kedua 2025. Konsumsi Pemerintah tumbuh 2,5% (yoy) sepanjang tahun, seiring peningkatan realisasi belanja setelah fase moderasi di awal tahun. Secara keseluruhan, belanja negara diarahkan untuk fokus pada program prioritas dan perlindungan sosial, dengan alokasi Rp805,4 triliun untuk program prioritas serta Rp110,7 triliun untuk stimulus rumah tangga dan dunia usaha. Di tengah kondisi global yang dinamis, APBN tetap memainkan perannya sebagai penyangga stabilitas sekaligus penggerak ekonomi.

Dari sisi investasi, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menunjukkan penguatan yang konsisten, tumbuh 5,09% (yoy) sepanjang tahun. Kualitas investasi juga membaik, tercermin dari lonjakan investasi mesin dan perlengkapan sebesar 17,99% (yoy). Realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang meningkat sepanjang 2025 turut menegaskan terjaganya kepercayaan investor di tengah stabilitas makro dan sinergi kebijakan.

Sisi eksternal tetap solid, dengan ekspor barang dan jasa

tumbuh 7,03% (yoy), didorong minyak nabati, besi dan baja, serta mesin dan elektronik. Sementara pertumbuhan impor mencapai 4,77% (yoy), terutama untuk impor bahan baku dan barang modal. Surplus neraca perdagangan berlanjut selama 68 bulan berturut-turut, dengan akumulasi surplus pada 2025 sebesar USD41,05 miliar.

Sektor Bernilai Tambah dan Pendukung Mobilitas Menjadi Penopang Pertumbuhan

Dari sisi produksi, penguatan ekonomi semakin merata dan selaras dengan agenda prioritas Pemerintah. Manufaktur tumbuh 5,30% (yoy) sepanjang 2025, didukung *Purchasing Managers' Index* (PMI) yang tetap ekspansif serta penguatan hilirisasi dan industri logam dasar. Perdagangan meningkat 5,49% (yoy), didorong meningkatnya pasokan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan dunia usaha seiring pembalikan aktivitas ekonomi. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 5,33% (yoy), ditopang penguatan ketahanan pangan dan meningkatnya permintaan domestik, termasuk untuk mendukung program MBG.

Mobilitas dan logistik tetap kuat. Transportasi tumbuh 8,78% (yoy), mencerminkan pergerakan masyarakat dan distribusi barang yang stabil, tanpa lagi bergantung pada efek basis rendah pascapandemi. Sejalan dengan itu, informasi dan komunikasi tumbuh 8,35% serta jasa keuangan 3,96%, menandakan digitalisasi yang meluas dan likuiditas yang membaik. Di sisi lain, pertambangan menjadi satu-satunya sektor yang terkontraksi akibat moderasi harga komoditas global.

Ketahanan Ekonomi Domestik Mendorong Perbaikan Kesejahteraan Rakyat

Yang tak kalah penting, momentum pertumbuhan 2025 juga terefleksikan pada indikator kesejahteraan rakyat. Per November 2025, jumlah penduduk bekerja meningkat menjadi 147,9 juta orang, bertambah 1,37 juta dibandingkan Agustus 2025, serta tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 4,74% (Agustus 2025: 4,85%). Tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,25% per September 2025 (Sep 2024: 8,57%). Ini menegaskan bahwa akselerasi ekonomi tidak hanya terlihat pada indikator makro, tetapi juga mendorong penciptaan lapangan kerja dan perbaikan kondisi sosial.

Dengan fondasi tersebut, Indonesia mampu memasuki 2026 dengan lebih kuat. Kebijakan fiskal yang antisipatif dan responsif menghadapi dinamika global dinilai berhasil membalikkan arah ekonomi tanpa mengorbankan disiplin fiskal.

“Pembangunan merupakan proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktural yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan

Sumitro Djojohadikusumo (1994)

Inflasi Januari tercatat 3,5% (yoy), meski secara bulanan mengalami deflasi 0,15% (mtm). Kenaikan terutama dipengaruhi *administered prices* akibat *low base effect* dengan adanya diskon tarif listrik pada awal 2025, sementara inflasi inti tetap terkendali, dengan tekanan terutama berasal dari harga emas. Inflasi *volatile food* juga menunjukkan perbaikan seiring normalisasi pasokan pascaNataru, meskipun risiko kenaikan menjelang Ramadhan tetap perlu diantisipasi.

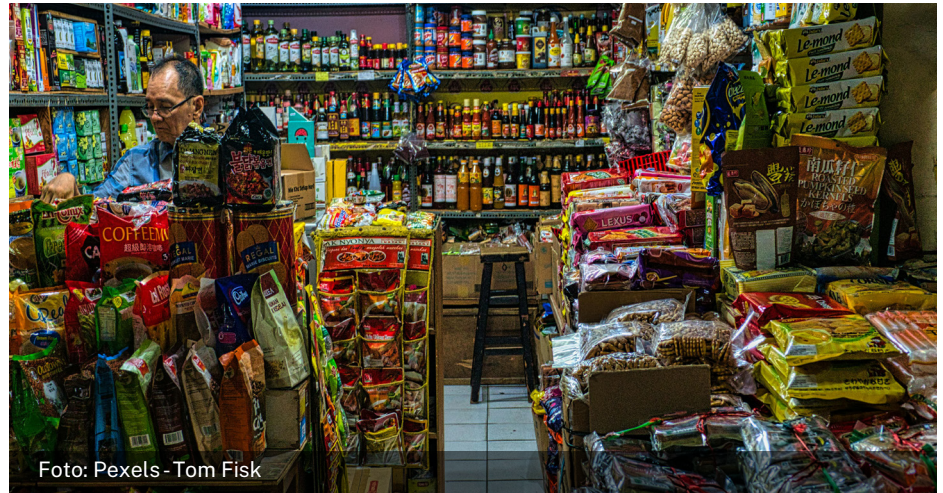


Foto: Pexels - Tom Fisk

Stabilitas Eksternal dan Pasar Keuangan Terjaga di Tengah Volatilitas Global

Ketahanan sektor eksternal tetap solid, ditopang surplus neraca perdagangan dan cadangan devisa yang memadai. Pada Januari 2026, cadangan devisa tercatat USD154,6 miliar, setara lebih dari enam bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, jauh di atas standar kecukupan internasional dan memberi ruang stabilisasi di tengah volatilitas global.

Pasar keuangan domestik sempat mengalami tekanan pada awal tahun dipicu pembekuan kenaikan bobot saham Indonesia oleh MSCI serta penyesuaian *outlook* oleh Moody's menjadi negatif, meski peringkat kredit tetap di level *investment grade* (Baa2). Tekanan tersebut bersifat sementara. Perbaikan sentimen global dan langkah proaktif Pemerintah dalam memperkuat tata kelola pasar keuangan memulihkan kepercayaan investor terhadap fundamental dan prospek ekonomi Indonesia.

Hingga 20 Februari 2026, arus modal mencatat *net inflow* sebesar Rp18,42 triliun (ytd), seiring *inflow* di pasar SRBI dan *outflow* terbatas di pasar SBN. IHSG kembali stabil di level 8.272, rupiah terjaga di kisaran Rp16.842/USD (ytd), serta *yield* SBN 10 tahun terkendali di kisaran 6,29% (ytd).

Dinamika Harga Komoditas Perlu Diantisipasi

Kinerja ekonomi dan APBN tetap dipengaruhi dinamika harga komoditas dan produksi migas, mengingat kontribusinya terhadap penerimaan negara dan neraca perdagangan. Pada awal 2026, harga minyak mentah Indonesia (ICP) menunjukkan tren moderasi dibandingkan rata-rata 2025, seiring penyesuaian harga energi global.

Dari sisi produksi, Pemerintah menargetkan *lifting* minyak sebesar 610 ribu barel dan *lifting* gas sebesar 984 ribu barel setara minyak per hari. Produksi Migas akan terus dioptimalkan untuk menjaga stabilitas penerimaan negara dan memperkuat ketahanan eksternal.

Secara keseluruhan, perekonomian Indonesia pada awal 2026 tetap menunjukkan ketahanan yang solid di tengah dinamika global. Konsumsi rumah tangga yang terjaga, investasi yang terus berlanjut, serta ekspor yang relatif stabil menopang momentum pertumbuhan yang diproyeksikan semakin menguat.

Momentum tersebut didukung oleh optimalisasi belanja negara pada awal tahun, percepatan sejumlah program prioritas, serta penguatan investasi dan konsumsi domestik, termasuk melalui

pembangunan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih, proyek hilirisasi strategis, dan stimulus fiskal kuartal pertama.

Dengan dukungan tersebut, fondasi makro yang tetap solid memberi ruang bagi APBN 2026 untuk bekerja lebih progresif menjaga stabilitas sekaligus mengakselerasi pertumbuhan dengan tetap menjaga kredibilitasnya.

REALISASI INDIKATOR EKONOMI DIBANDINGKAN ASUMSI APBN 2026	
Pertumbuhan Ekonomi (yoy)	5,4% 5,5% <i>Outlook Triwulan I 2026</i>
Inflasi (yoy)	2,5% 3,55% Januari 2026
Nilai Tukar Rp16.500/USD	Rp16.842/USD (ytd) Rp16.925/USD (eop) 20 Februari 2026
Yield SBN 10 Tahun 6,9%	6,29% (ytd) 6,38% (eop) 18 Februari 2026
Harga Minyak Mentah (ytd) USD70/barel	64,41 Januari 2026
Lifting Minyak (barel/hari) 610 ribu	- <i>Data realisasi 2026 belum tersedia</i>
Lifting Gas (barel setara minyak/hari) 984 ribu	- <i>Data realisasi 2026 belum tersedia</i>

Sumber : Kemenkeu, BI, BPS

APBN 2026: Responsif, Adaptif, dan Tetap Sehat

Menjadi Motor Pembangunan dan Pertumbuhan Berkelanjutan

APBN 2026 diarahkan untuk mempercepat agenda pembangunan menuju Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Sejalan dengan itu, kinerja APBN hingga akhir Januari 2026 menunjukkan capaian yang baik dan tetap on track dalam mendukung prioritas pemerintah.

Hingga 31 Januari 2026, pendapatan negara mencapai Rp172,7 triliun atau tumbuh 9,5% (yoy), ditopang penerimaan perpajakan yang tetap kuat serta PNBPN yang mulai menunjukkan pemulihan setelah tahun lalu dipengaruhi komponen non-berulang. Di sisi lain, belanja negara terealisasi Rp227,3 triliun atau tumbuh 25,7% (yoy), menandakan akselerasi pelaksanaan program prioritas dan penguatan perlindungan sosial sejak awal tahun.

Defisit APBN tercatat Rp54,6 triliun (0,21% PDB), jauh di bawah batas aman. Defisit keseimbangan primer sebesar Rp4,2 triliun semakin menegaskan bahwa struktur fiskal tetap terjaga. Ekspansi fiskal yang terjadi bersifat terarah dan produktif untuk mendorong daya beli masyarakat, menjaga momentum aktivitas ekonomi, serta memperkuat fondasi pertumbuhan yang berkelanjutan. Pembiayaan anggaran dikelola secara prudent untuk memastikan program pembangunan dan perlindungan masyarakat tetap berjalan dengan memperhatikan biaya dan risiko yang paling efisien.

Realisasi APBN hingga 31 Januari 2026

URAIAN (dalam Triliun Rupiah)	2025		2026		
	APBN	Realisasi Januari	APBN	Realisasi Januari	% thd APBN
PENDAPATAN NEGARA	3.005,1	157,8	3.153,6	172,7	5,5
PENERIMAAN PERPAJAKAN	2.490,9	115,2	2.693,7	138,9	5,2
Penerimaan Pajak	2.189,3	88,9	2.357,7	116,2	4,9
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai	301,6	26,3	336,0	22,6	6,7
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	513,6	42,5	459,2	33,9	7,4
PENERIMAAN HIBAH	0,6	-	0,7	-	-
BELANJA NEGARA	3.621,3	180,8	3.842,7	227,3	5,9
BELANJA PEMERINTAH PUSAT	2.701,4	86,0	3.149,7	131,9	4,2
Belanja K/L	1.160,1	24,4	1.510,5	55,8	3,7
Belanja non-K/L	1.541,4	61,7	1.639,2	76,1	4,6
TRANSFER KE DAERAH	919,9	94,7	693,0	95,3	13,8
KESEIMBANGAN PRIMER	(63,3)	11,1	(89,7)	(4,2)	4,7
DEFISIT ANGGARAN	(616,2)	(23,0)	(689,1)	(54,6)	7,9
% Defisit terhadap PDB	(2,53)	(0,09)	(2,68)	(0,21)	
PEMBIAYAAN ANGGARAN	616,2	154,8	689,1	105,1	15,2

Pendapatan Negara Tetap Positif, Pajak Tumbuh Kuat

Hingga akhir Januari 2026, penerimaan pajak neto tercatat Rp116,2 triliun atau 4,9% dari target APBN, tumbuh 30,7% (yoy), sementara secara bruto tumbuh 7,0%. Pertumbuhan ini didukung oleh penurunan restitusi serta peningkatan kinerja, terutama PPN dan PPNBM yang pertumbuhannya melonjak hingga 83,9% (yoy) dan menunjukkan konsumsi domestik yang tetap resilien. Meski terdapat penyesuaian pada PPh 21 dan PPh Final, secara keseluruhan capaian Januari telah mencapai 4,9% dari target APBN, memberikan fondasi yang baik untuk kinerja penerimaan tahun 2026.

Dari sisi sektoral, mayoritas sektor utama menunjukkan pertumbuhan positif secara bruto. Industri pengolahan mencatatkan kinerja *double digit*, terutama didorong industri logam dasar dan subsektor kimia, sementara sektor perdagangan tumbuh ditopang perdagangan besar dan eceran serta peningkatan transaksi daring. Meskipun pertumbuhan neto pada kedua sektor tersebut relatif terbatas karena faktor restitusi, aktivitas riilnya tetap solid. Sektor pertambangan tumbuh baik secara bruto maupun

neto, khususnya pada komoditas minyak dan gas bumi. Di sektor keuangan dan asuransi secara neto mencatat pertumbuhan positif, sedangkan secara bruto mengalami penyesuaian akibat pembayaran dividen ke luar negeri. Ke depan, penerimaan pajak diproyeksikan tetap tumbuh positif seiring konsumsi dan aktivitas ekonomi yang terjaga serta tren restitusi yang lebih terkendali.

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Dipengaruhi Faktor Harga dan Produksi

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai hingga Januari 2026 terealisasi sebesar Rp22,6 triliun atau 6,7% dari target APBN. Penerimaan Bea Masuk tercatat Rp3,7 triliun, turun 4,4% (yoy). Penurunan ini dipengaruhi oleh meningkatnya pemanfaatan tarif *Most Favored Nation* (MFN) sebesar 0% dan optimalisasi berbagai perjanjian perdagangan bebas (*Free Trade Agreements*/FTA), serta restitusi yang lebih tinggi.

Penerimaan Bea Keluar mencapai Rp1,4 triliun, terkontraksi 41,6% (yoy), terutama akibat penurunan harga komoditas utama, khususnya *Crude Palm Oil* (CPO). Meskipun volume ekspor meningkat, tekanan

harga global menyebabkan penerimaan tetap terkoreksi. Sementara penerimaan Cukai terealisasi sebesar Rp17,5 triliun, turun 12,4% (yoy), dipengaruhi pola produksi hasil tembakau pada akhir 2025 yang lebih rendah sehingga berdampak pada setoran awal tahun.

Kepabeanaan dan cukai tidak hanya berperan sebagai penghimpun penerimaan (*revenue collector*), tetapi juga sebagai fasilitator perdagangan (*trade facilitator*) dan pelindung masyarakat (*community protector*). Oleh karena itu, Pemerintah terus memperkuat kinerja pengawasan, antara lain melalui penindakan rokok ilegal sejumlah 1.243 kali pada tahun 2026, dengan barang bukti yang diamankan mencapai 249 juta batang. Pemerintah juga melakukan penindakan narkotika hingga 95 kali, dengan peningkatan barang bukti lebih dari dua kali lipat menjadi 0,21 ton.

PNBP Dikelola Optimal di Tengah Dinamika Harga Komoditas

Hingga 31 Januari 2026, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp33,9 triliun atau 7,4% dari target. Secara umum, kinerja PNBP melemah 20,4% (yoy), terutama dipengaruhi tidak berulangnya setoran dividen BUMN perbankan yang pada Januari tahun lalu masih tercatat sekitar Rp10,9 triliun. Seiring penataan kelembagaan dan pengelolaan investasi negara berdasarkan regulasi terbaru, pola setoran dividen tersebut kini mengikuti mekanisme yang berbeda. Apabila komponen Pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) tidak diperhitungkan, PNBP justru tumbuh 6,7% (yoy).

PNBP Sumber Daya Alam (SDA) Migas mengalami penyesuaian sejalan dengan moderasi harga ICP, perkembangan lifting migas, serta penyesuaian skema bagi hasil pada beberapa kontrak. Sebaliknya, SDA Minerba tumbuh



Foto: Kementerian Keuangan

14,8% (yoy) meskipun harga batubara mengalami penurunan, didukung oleh peningkatan tarif PNBP mineral sesuai implementasi regulasi terbaru.

Kinerja PNBP K/L tumbuh 27,8% (yoy), terutama berasal dari peningkatan pendapatan premium Surat Berharga Negara dan jasa transportasi. Sementara itu, pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) melonjak 96,3% (yoy), didorong oleh peningkatan layanan rumah sakit, pendidikan, serta sektor kelapa sawit.

Dengan penguatan tata kelola, reformasi struktural, serta optimalisasi potensi sektor non-komoditas, kinerja PNBP ke depan diproyeksikan semakin solid dan berkelanjutan.

Belanja Negara Fokus pada Agenda Prioritas dan Responsif Mendukung Kebutuhan Belanja Daerah

Belanja negara pada APBN 2026 diarahkan untuk mendukung delapan agenda prioritas, yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, program Makan Bergizi Gratis, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa/koperasi/UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan.

Hingga akhir Januari 2026, realisasi belanja negara mencapai Rp227,3 triliun (5,9% dari pagu APBN), tumbuh 25,7% (yoy). Belanja tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp131,9 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp95,3 triliun.

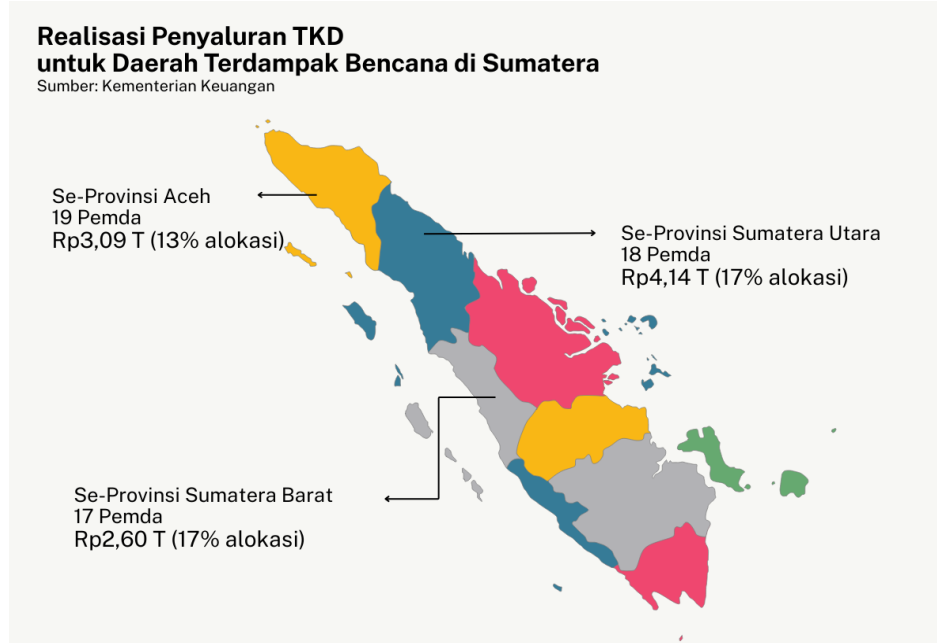
BPP menunjukkan akselerasi program prioritas sejak awal tahun melalui komponen belanja K/L dan belanja Non-K/L. Belanja K/L terealisasi Rp55,8 triliun, (3,7% dari pagu), antara lain didorong penyaluran program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum terealisasi pada Januari tahun sebelumnya. Selain itu, realisasi juga didorong penyaluran bantuan sosial seperti PBI JKN dan PKH, yang menunjukkan komitmen pemerintah menjaga perlindungan sosial dan daya beli masyarakat sejak awal tahun anggaran.

Sementara itu, Belanja Non-K/L mencapai Rp76,1 triliun (4,6% dari pagu) untuk membayar kewajiban pemerintah tepat waktu antara lain mencakup pembayaran manfaat pensiun. Hal ini penting sebagai wujud komitmen pemerintah untuk menjaga kredibilitas APBN.

Ke depan, BPP diproyeksikan meningkat seiring penyaluran THR serta akselerasi pelaksanaan program K/L strategis untuk menjaga momentum pertumbuhan dan perlindungan masyarakat.

Di sisi Transfer ke Daerah, realisasi hingga akhir Januari 2026 mencapai Rp95,3 triliun, mendorong belanja daerah yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. TKD terus dioptimalkan untuk mendukung pelayanan publik di daerah, termasuk dukungan gaji bagi 4,3 juta ASN Daerah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 42,3 juta peserta didik, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BOP) PAUD untuk 5,8 juta peserta didik, BOP Kesetaraan untuk 992 ribu peserta didik, serta tunjangan guru untuk 616 ribu guru.

Peningkatan penyaluran TKD pada awal tahun turut dipengaruhi kebijakan relaksasi bagi daerah terdampak bencana di Sumatera. Hingga 31 Januari 2026, realisasi penyaluran TKD untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai Rp9,8 triliun, dengan persentase penyaluran lebih tinggi dari rata-rata nasional. Hal ini disebabkan oleh percepatan penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan BOS. Realisasi Aceh



relatif lebih rendah karena Dana Otonomi Khusus baru disalurkan pada awal Februari.

Pemerintah juga menambahkan alokasi Rp10,65 triliun yang akan disalurkan bertahap selama tiga bulan untuk mendukung pemulihan ekonomi bagi daerah terdampak.

Langkah ini menegaskan komitmen APBN dalam mendukung penanganan bencana, tidak hanya melalui respons darurat, tetapi juga melalui dukungan fiskal berkelanjutan guna mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi.



Foto: Kementerian Keuangan

Stimulus Fiskal Ramadan–Idulfitri 2026 Perkuat Daya Beli dan Mobilitas

Untuk menjaga daya beli dan mendorong konsumsi selama Ramadan–Idulfitri 2026, Pemerintah menyiapkan paket stimulus komprehensif, terutama pada sektor transportasi dan perlindungan sosial.

Di sektor transportasi, pemerintah memberikan diskon 30% untuk kereta api dengan target 1,2 juta penumpang dan untuk angkutan laut bagi 445 ribu penumpang. Sementara itu, pada angkutan penyeberangan, pemerintah memberikan diskon 100% jasa kepelabuhanan, menjangkau 403 ribu penumpang dan 945 ribu unit kendaraan (setara 2,4 juta jiwa).

Pemerintah juga memberikan penurunan harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi untuk 3,3 juta penumpang. Penurunan harga tersebut sekitar 17–18% yang dipenuhi melalui kombinasi PPN Ditanggung Pemerintah, penyesuaian biaya bandara, avtur, dan fuel surcharge.

Di sisi perlindungan sosial, Pemerintah menyalurkan bantuan pangan berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng kepada 35,04 juta keluarga penerima manfaat untuk dua bulan sekaligus (Februari dan Maret). Pemerintah juga menyalurkan THR kepada sekitar 10,5 juta ASN, TNI/Polri, dan pensiunan yang mulai dicairkan akhir Februari 2026.

Dukungan fiskal tersebut dirancang memperkuat mobilitas dan konsumsi selama Ramadan–Idulfitri sekaligus menopang pertumbuhan awal tahun.



Foto: Sekretariat Negara

Belanja Prioritas APBN 2026 Terus Dioptimalkan untuk Mendorong Pertumbuhan dan Mengakselerasi Dampak

Belanja negara APBN 2026 dirancang bukan hanya untuk menjaga momentum ekonomi, tetapi untuk memastikan arah pertumbuhan semakin terarah dan berdampak. Melalui penguatan belanja prioritas, APBN bekerja menjaga stabilitas sekaligus mengakselerasi transformasi ekonomi, memastikan setiap rupiah belanja memberi dampak yang nyata bagi masyarakat dan produktivitas nasional.

Hingga akhir Januari 2026, berbagai program utama telah berjalan sejak awal tahun. Dalam aspek perlindungan sosial, percepatan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai Rp5,6 triliun, sementara pada Januari tahun sebelumnya belum terdapat penyaluran. Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan juga telah disalurkan kepada 96,7 juta peserta, memperkuat jaring pengaman sosial sekaligus menjaga ketahanan rumah tangga terhadap risiko kesehatan.

Di sisi ketahanan pangan dan stabilisasi harga, realisasi anggaran mencapai Rp23,6 triliun, termasuk melalui Belanja Pemerintah Pusat untuk

penguatan lumbung pangan sebesar Rp0,6 triliun. Dukungan tersebut diarahkan pada optimasi lahan, irigasi perpompaan, fasilitasi pupuk dan pestisida, serta pengembangan jaringan irigasi dan sarana prasarana sumber daya air. Selain itu, realisasi ketahanan pangan juga berasal dari pembiayaan investasi kepada Perum BULOG yang mencapai Rp22,7 triliun. Hingga akhir Januari, stok beras nasional tercatat sebesar 3,33 juta ton, atau sekitar 128% dari kebutuhan tahunan, sehingga dapat memberi ruang stabilisasi harga yang lebih kuat, melindungi petani, sekaligus menjaga keterjangkauan pangan bagi masyarakat.

Di sektor pembiayaan UMKM, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp21,8 triliun kepada sekitar 0,4 juta debitur, mendukung ekspansi usaha kecil dan memperkuat basis ekonomi daerah. Sebagian besar penyaluran diarahkan ke sektor produktif, terutama perdagangan, pertanian, dan jasa, dengan porsi sektor produksi mencapai lebih dari 60%.

Pada sektor pelayanan publik, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terealisasi Rp36,6 triliun atau 10,9% dari pagu, menjangkau sekitar 60 juta penerima melalui lebih dari 23 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga 21 Februari 2026. Program ini tidak hanya meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan, tetapi juga menciptakan sekitar satu juta lapangan kerja serta menggerakkan rantai pasok.

Untuk penguatan kualitas pendidikan, pemerintah merealisasikan anggaran melalui Program Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda (SUG), dan Revitalisasi Sekolah. Realisasi Sekolah Rakyat mencapai Rp114,37 miliar dengan total sekolah yang sudah beroperasi sebesar 166 SR, dengan penambahan 104 sekolah yang akan dibangun pada 2026

Program Sekolah Unggul Garuda mencatat realisasi Rp217,9 miliar, mencakup pembangunan sekolah unggulan baru serta transformasi SMA di berbagai provinsi, yang turut didukung pembentukan Dana Abadi guna menjamin keberlanjutan pembiayaan jangka panjang. Sementara itu, revitalisasi sekolah dan madrasah pada 2026 mencapai Rp29,3 miliar, digunakan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana belajar untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih layak dan kondusif.

Akselerasi pertumbuhan dari tingkat akar rumput juga diperkuat melalui Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KD/KMP). Hingga 20 Februari 2026, lebih dari 24 ribu gerai KDMP tengah dalam proses pembangunan, menuju target 30 ribu gerai pada Triwulan I dan 50 ribu gerai pada Agustus 2026. Untuk mendukung implementasi tersebut, pemerintah menyiapkan *capital expenditure* sebesar Rp90 triliun pada Triwulan I 2026, menunjukkan komitmen kuat Pemerintah dalam menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Dengan strategi yang bergerak dari hulu ke hilir dan dari pusat hingga desa, APBN tidak hanya menjadi instrumen stabilisasi, tetapi juga penggerak utama pertumbuhan yang inklusif dan berdaya tahan.

Pembiayaan APBN 2026 Berjalan On Track, Menjaga Kredibilitas Fiskal

Defisit APBN 2026 dipenuhi melalui bauran pembiayaan utang dan non-utang yang dikelola secara prudent, serta mempertimbangkan kebutuhan likuiditas dan dinamika pasar keuangan. Hingga 31 Januari 2026, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp105,06 triliun atau 15,2% dari target APBN, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang telah mencapai 29,6%.

Dari sisi pembiayaan utang, realisasi tercatat Rp127,3 triliun atau 15,3% dari target, juga lebih rendah dibandingkan 23,7% pada Januari 2025. Pemenuhan pembiayaan dilakukan secara terkendali melalui langkah antisipatif, termasuk penerapan *active cash and debt management* untuk menjaga ketersediaan kas Pemerintah.

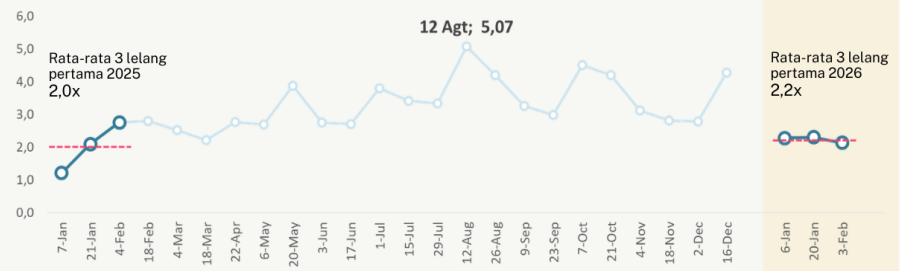
Sebagian besar pembiayaan utang dipenuhi melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), dengan kinerja pasar perdana domestik yang tetap solid di tengah volatilitas global. Pada tiga lelang pertama tahun 2026, baik SUN dan SBSN mencatatkan *bid-to-cover ratio* yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Rata-rata tertimbang *yield* hasil lelang juga tetap terjaga. Hal ini menandakan kepercayaan investor yang tetap kuat terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Pemerintah terus menjaga stabilitas pasar SBN melalui koordinasi kebijakan yang erat dengan otoritas moneter, sehingga pembiayaan dapat dilakukan secara efisien dan berkesinambungan.

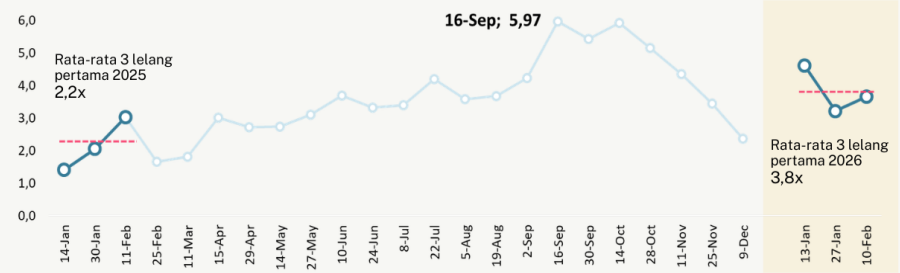
Permintaan SBN Menguat di Awal Tahun

Tiga lelang pertama 2026 mencatat *bid-to-cover ratio* lebih tinggi dari 2025

Bid to Cover Ratio Lelang Surat Utang Negara



Bid to Cover Ratio Lelang Surat Berharga Syariah Negara



Indonesia menjadi salah satu *sovereign* Asia pertama yang mengakses pasar obligasi global pada 2026, dengan memanfaatkan momentum likuiditas awal tahun yang masih kuat.

Pemerintah berhasil menerbitkan Global Bond senilai USD2,7 miliar yang terdiri atas tenor 5 tahun (USD1,1 miliar, *yield* 4,40%), 10 tahun (USD1,1 miliar, *yield* 5,00%), dan 30 tahun (USD500 juta, *yield* 5,50%). Transaksi ini mencatat total permintaan sebesar USD7,7 miliar, atau sekitar 2,6 kali untuk tenor 5 dan 10 tahun serta 3,8 kali untuk tenor 30 tahun. Kinerja tersebut mencerminkan kepercayaan investor global terhadap fundamental ekonomi Indonesia, serta menunjukkan efektivitas strategi pembiayaan yang oportunistik namun tetap prudent dalam mengelola biaya dan risiko.

Realisasi pembiayaan non-utang negatif Rp22,2 triliun, antara lain berasal dari pembiayaan investasi. Pada tahun 2026, Pemerintah mengalokasikan Pembiayaan Investasi sebesar Rp203,06 triliun, yang telah disalurkan untuk OIP Bulog sebesar Rp22,73 triliun dalam rangka penguatan cadangan beras dan stabilisasi harga pangan. Selain itu, terdapat penerimaan kembali investasi sebesar Rp49 miliar dari pelunasan PEN Daerah.

APBN tetap solid, sehat, dan responsif mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Reformasi pengelolaan APBN terus diperkuat melalui optimalisasi penerimaan, peningkatan kualitas belanja, serta pembiayaan yang efisien agar ruang fiskal tetap terjaga dan program prioritas berjalan efektif.

NEWSLETTER

APBNKiTA

KINERJA DAN FAKTA

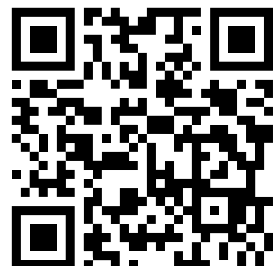
Newsletter ini merupakan versi ringkas dari Paparan Menteri Keuangan pada Konferensi Pers APBN KiTa. Publik dapat mengakses diseminasi APBN KiTa lainnya, yaitu Bahan Paparan dan Buku APBN KiTa melalui QR Code yang tersedia di halaman ini.

Temukan versi APBN KiTa selengkapnya di sini.

Narahubung media:

Deni Surjantoro
Kepala Biro Komunikasi dan
Layanan Informasi
Kementerian Keuangan
kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id
+62813-1000-4134

Hidayat Amir
Direktur Strategi dan Portofolio
Pembiayaan
Kementerian Keuangan
sekretariat.alco@kemenkeu.go.id
+62821-2484-9458



Edisi V | Februari 2026 disusun oleh:
Aulia Wahyu M. (Penulis), M. Hilman Nursyahada (Editor),
I Gede Yuddy Hendranata (Penanggung Jawab) dan Aditya W. (Cover)
Tim Sekretariat ALCO Kementerian Keuangan